



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)**

**DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM  
TAHUN 2021**

# Daftar Isi

<b>Daftar Isi</b> .....	i
<b>Kata Pengantar</b> .....	iii
<b>Ringkasan Eksekutif</b> .....	v
<b>DENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Maksud Dan Tujuan</b> .....	3
<b>1.3 Data Umum Organisasi</b> .....	3
<b>1.3.1 Struktur Organisasi</b> .....	3
Tabel 1.1 .....	4
Bagan Struktur Organisasi .....	4
<b>1.3.2 Tugas Pokok Dan Fungsi</b> .....	4
<b>1.3.3 Sumber Daya Manusia</b> .....	5
Tabel 1.2 .....	5
SDM Menurut Golongan .....	5
Tabel 1.3 .....	5
SDM Menurut Pendidikan.....	5
Tabel 1.4 .....	6
SDM Menurut Penempatan.....	6
<b>1.3.4. Sarana Dan Prasarana</b> .....	6
Tabel 1.5 .....	6
Sarana dan Prasarana .....	6
<b>1.3.5 Keuangan</b> .....	6
Tabel 1.6 .....	7
Keuangan.....	7
<b>1.4 Sistematika Penyajian</b> .....	7
<b>Bab II</b> .....	9
<b>PERENCANAAN KINERJA</b> .....	9
<b>2.1 Pernyataan Visi</b> .....	9
<b>2.2 Pernyataan Misi</b> .....	10
<b>2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis</b> .....	11
<b>2.3 Program Kerja</b> .....	12
<b>2.4 Indikator Kinerja Utama</b> .....	13



Tabel 2.1 .....	13
Indikator Kinerja Utama .....	13
<b>2.5 Perencanaan Kinerja</b> .....	14
Tabel 2.2 .....	15
Perencanaan Kinerja.....	15
<b>2.6 Penetapan Kinerja</b> .....	17
Tabel 2.3 .....	18
Penetapan Kinerja APBD 2021 .....	18
Tabel 2.4 .....	21
Penetapan Kinerja APBDP 2021.....	21
<b>Bab III</b> .....	24
<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	24
<b>2.1 Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja</b> .....	25
Tabel 3.1 .....	26
<b>Pengukuran Indikator Kinerja Utama</b> .....	26
Tabel 3.2 .....	29
<b>Pengukuran Perencanaan Kinerja</b> .....	29
<b>3.2 Realisasi Anggaran</b> .....	38
Tabel 3.3 .....	40
<b>Serapan Anggaran Tahun 2021</b> .....	40
<b>Bab IV</b> .....	42
<b>DENUTUP</b> .....	42
<b>4.1 Kesimpulan</b> .....	42
<b>4.2 Rekomendasi</b> .....	43



# Kata Pengantar

P

uji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tahun 2021 dan sekaligus dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan yaitu Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota Batam ini merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya yang harapannya dapat dimanfaatkan untuk:

- (1) Bahan evaluasi kinerja;
- (2) Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- (3) Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- (4) Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.



Laporan ini memuat capaian kinerja yang merupakan realisasi kinerja dari target-target kinerja yang diperjanjikan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja. Pada umumnya sasaran yang direncanakan tahun 2021 dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, LKjIP juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam sebagai umpan balik/pendorong untuk meningkatkan kinerja.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan LKjIP ini. Ibarat pepatah "Nobody is Perfect" maka dari itu segala kritikan untuk perbaikan LKjIP ini sangat kami hargai. Semoga Allah S.W.T tetap membimbing dan menyadarkan kita untuk selalu berkarya lebih baik lagi sehingga Visi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan Kota Batam.

Batam, 16 Februari 2022



# Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota Batam ini merupakan pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yang dihasilkan tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

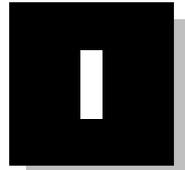
- a. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka dengan indikator presentase tingkat pengangguran terbuka, capaian kinerja sampai akhir bulan Desember 2020 adalah meningkat sebesar 5.59% dari target, hal ini disebabkan banyaknya perusahaan yang tutup maupun pengurangan karyawan karena pandemi hingga kurangnya lowongan kerja.
- b. Tersedianya lapangan kerja dan kesempatan kerja dengan indikator:
  1. Persentase pencari kerja yang ditempatkan, capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2020 adalah 101.6% masuk kategori tinggi.
  2. Persentase tingkat kesempatan kerja capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2020 adalah 70.00% masuk kategori tinggi.
  3. Persentase wirausaha baru capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2020 adalah 0% masuk kategori rendah. Hal ini terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan rasionalisasi anggaran hingga tertundanya pelaksanaan kegiatan.
- c. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja dengan indikator Persentase tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi capaian kinerja sampai akhir bulan Desember 2020 adalah 122% masuk kategori sangat baik.
- d. Meningkatnya kualitas lembaga pelatihan dengan indikator Persentase lembaga kerja yang terakreditasi capaian kinerja sampai akhir bulan Desember 2020 adalah 100% masuk kategori tinggi.
- e. Meningkatnya ketenangan bekerja dan berusaha bagi pekerja dan pengusaha dengan indikator :



1. Meningkatnya persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2020 adalah 148.4 % masuk kategori sangat baik.
  2. Persentase perusahaan yang melaksanakan peraturan ketenagakerjaan capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2020 adalah 108.7% masuk kategori tinggi.
- f. Meningkatnya perlindungan sosial bagi tenaga kerja dengan indikator Persentase buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2020 adalah 92.11% masuk kategori baik

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam di masa akan datang. Pertama pelaksanaan pelatihan dengan pendataan penempatan peserta dilakukan dalam tahun yang sama sehingga pemantauan kurang maksimal, kedua masih terbatasnya kesempatan kerja disektor formal dan masih adanya kesempatan kerja yang tidak bisa terisi karena tidak sesuainya kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia industri, ketiga hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai acuan bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.





# Bab I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang



alam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir anggaran. Dalam dunia birokrasi, Akuntabilitas Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan instansi yang bersangkutan.

Mengacu pada Permenpan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tahun 2021 merupakan wujud Akuntabilitas dan Transparansi pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2021 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021. Penyusunan LKjIP

Dinas Tenaga Kerja 2021 ini pada dasarnya merupakan kewajiban yang menjadi keharusan Instansi Pemerintah dalam memberikan penjelasan secara tertulis mengenai pertanggungjawaban terhadap Kinerja / Realisasi yang telah dilakukan selama tahun 2021. Penyusunan LKjIP Dinas Tenaga Kerja tahun 2021 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai Akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2021.

LKjIP tahun 2021 merupakan bagian dari informasi Pengukuran Kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja tahun 2021-2026 adalah dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021 - 2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong Instansi Pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Sebagai bagian dari unsur penyelenggara Pemerintah Kota Batam Dinas Tenaga Kerja dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik baik yang bersifat teknis maupun non teknis harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Dinas Tenaga Kerja memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada tahun 2021.



## **1.2 Maksud Dan Tujuan**

Maksud penyusunan LKjIP tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja Kota Batam adalah sebagai penjabaran dari Visi Dan Misi Dinas Tenaga Kerja yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Sehingga LKjIP ini dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Organisasi.

Tujuan penyusunan LKjIP Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2021 adalah bertujuan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sehingga diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang agar pencapaian program dan kebijakan dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun.

## **1.3 Data Umum Organisasi**

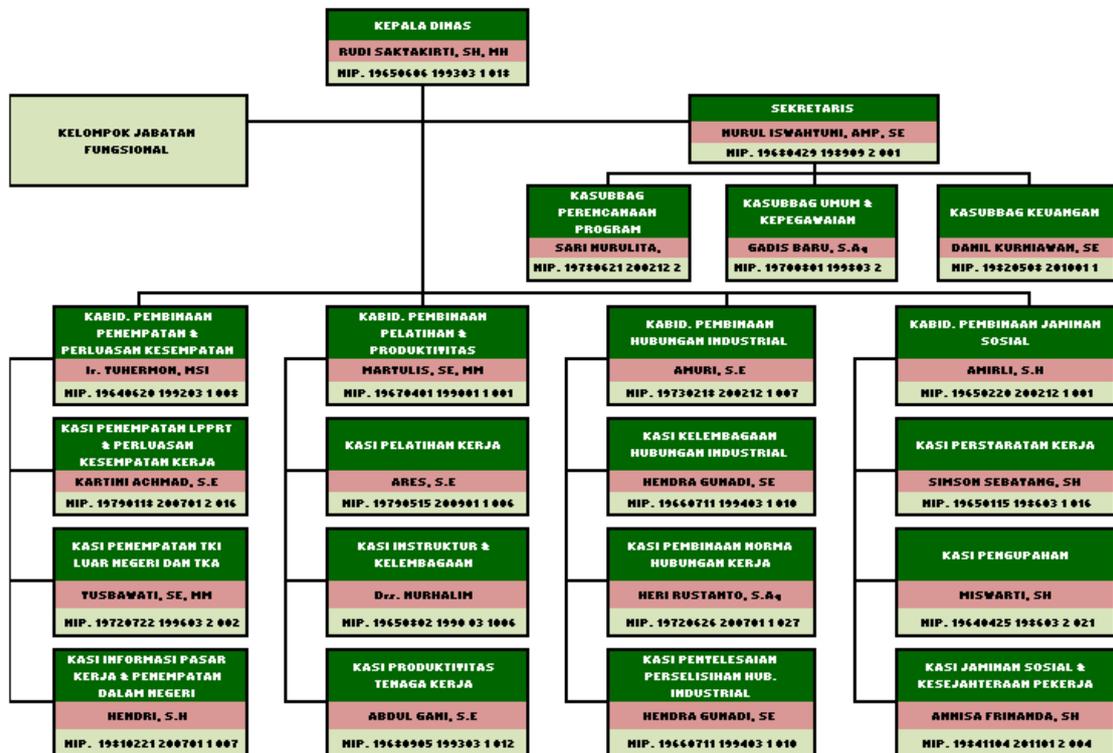
Kelembagaan dalam organisasi menjadi faktor utama dalam menentukan untuk mencapai keberhasilan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai.

### **1.3.1 Struktur Organisasi**

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



**Tabel 1.1**  
**Bagan Struktur Organisasi**



### 1.3.2 Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang ketenagakerjaan daerah sesuai dengan kewenangannya. Dalam pelaksanaan tugas pokok, Kepala Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

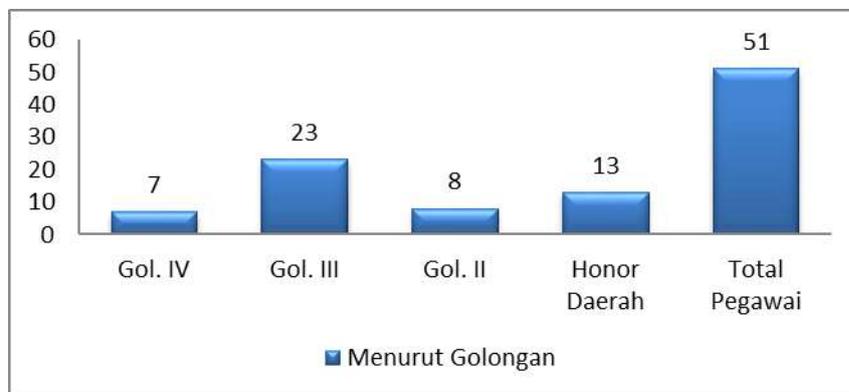
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketenagakerjaan;

3. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketenagakerjaan; dan
4. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dinas.

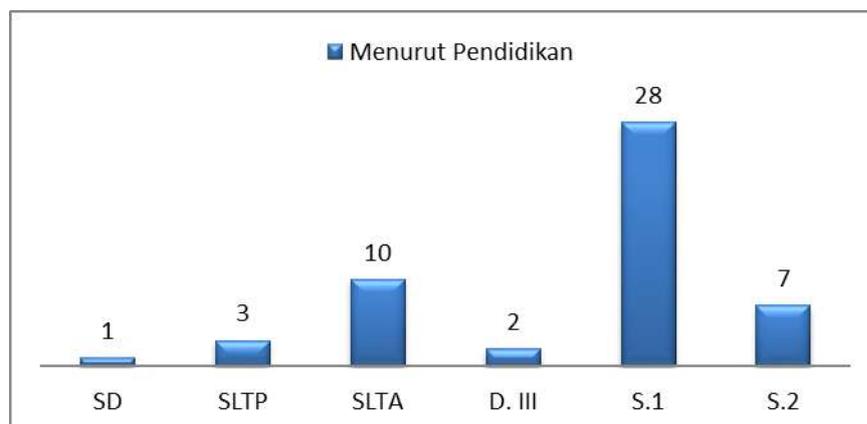
### 1.3.3 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam didukung oleh personel / Sumber Daya Manusia sebanyak 51 (lima puluh satu) orang, terinci sebagai berikut:

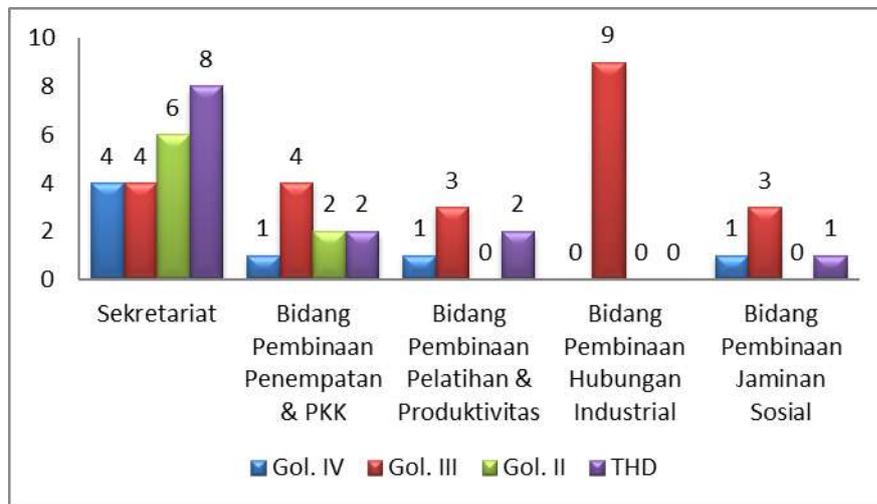
**Tabel 1.2**  
**SDM Menurut Golongan**



**Tabel 1.3**  
**SDM Menurut Pendidikan**



**Tabel 1.4**  
**SDM Menurut Penempatan**



### 1.3.4. Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana (barang Milik / Kekayaan Daerah = BM/KD) Dinas Tenaga Kerja Kota Batam per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

**Tabel 1.5**  
**Sarana dan Prasarana**

NO.	URAIAN	SATUAN	NILAI (Rp)
1.	Tanah	2,034 m <sup>2</sup> 300 m <sup>2</sup>	1.744.300.400
2.	Gedung dan Bangunan	4 item	121.990.000
3.	Peralatan dan Mesin	407 buah	3.262.249.550
4.	Kendaraan roda 4	5 unit	1.170.800.000

### 1.3.5 Keuangan

Anggaran dan Realisasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tahun 2021 terinci sebagai berikut:

**Tabel 1.6**  
**Keuangan**

NO	JENIS BELANJA	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	SISA DPA (RP)	%
<b>BELANJA DAERAH</b>					
1.	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>21.710.198.109</b>	<b>21.107.363.013</b>	<b>602.835.096</b>	<b>97.22</b>
	Belanja Pegawai	7.507.968.029	7.151.860.935	356.107.094	95.25
	Belanja Barang & Jasa	14.202.230.080	13.955.502.078	246.728.002	98.26
2.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>146.740.000</b>	<b>139.650.000</b>	<b>7.090.000</b>	<b>95.17</b>
	Belanja Modal Peralatan & Mesin	146.740.000	139.650.000	7.090.000	95.17
<b>JUMLAH</b>		<b>21.856.938.109</b>	<b>21.247.013.013</b>	<b>609.925.096</b>	<b>97.20</b>

#### **1.4 Sistematika Penyajian**

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2021. Strategis disini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.

Laporan akuntabilitas kinerja ini terdiri dari 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I :           Pendahuluan, Menguraikan tentang : Gambaran Umum Organisasi, Aspek Strategis Organisasi, Dan Sistematika Penyajian
- BAB II :           Perencanaan Dan Penetapan Kinerja
- BAB III :          Akuntabilitas Kinerja Menguraikan Tentang : Pengukuran Kinerja, Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja, Serta Akuntabilitas Keuangan
- BAB IV :          Penutup Menguraikan Tentang Tinjauan Secara Umum Terhadap Kinerja Yang Telah Dicapai Termasuk Upaya Strategis Untuk Meningkatkan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Di Tahun Mendatang (Years To Years)





## Bab II

# PERENCANAAN KINERJA



alam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Rencana Strategis merupakan langkah yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategi organisasi. Sebagai instansi yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penanganan bidang Ketenagakerjaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Tujuan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2021-2026, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Perencanaan Kinerja yang berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan. Perencanaan tersebut meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam tahun 2021 telah ditetapkan rencana dan target kinerja.

### 2.1 Pernyataan Visi

Visi merupakan tujuan akhir dari keinginan yang dapat menggambarkan atau memberikan cita dan citra yang ingin diwujudkan dan sekaligus memotivasi dan memberi semangat yang senantiasa mewarnai pola pikir dan langkah dalam mengelola keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Batam periode Tahun 2021-2026, dari misi tersebut dalam pelaksanaannya terdapat 5 (lima) misi Kota Batam, yang terkait dengan ketenagakerjaan Misi ke – 3 yaitu :



***Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia, dengan tujuan mewujudkan pembangunan manusia yang unggul dan bertakwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera, dengan sasaran yaitu Menurunnya angka pengangguran.***

Dinas Tenaga Kerja Kota Batam harus mampu menjadi motivator dan tauladan serta sebagai transformator dalam mewujudkan kebijaksanaan Walikota Batam serta terciptanya tenaga kerja yang berdaya saing, berbudaya, produktif dan berakhlak mulia, melalui program Pembangunan Kota Batam Tahun 2021 – 2026.

## **2.2 Pernyataan Misi**

Misi merupakan sesuatu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan secara maksimal, yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuannya dalam mencapai visi yang telah ditetapkan.

Adapun Misi Pemerintah Kota Batam dibagi atas 5 (lima) pernyataan misi dalam rangka mewujudkan visi dimaksud, sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.
- 2) Mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan didukung infrastruktur, utilitas dan sistem transportasi yang maju, ramah, aman, asri dan nyaman sesuai tata ruang.
- 3) Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berbudaya, produktif dan berakhlak mulia.
- 4) Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi dan juga tercapainya prioritas program kerja Walikota yaitu Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam berupaya menuangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Adapun dukungan program tersebut yaitu Pelatihan Kerja & Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Penempatan Kerja. Diharapkan melalui dukungan kedua program ini dapat meningkatkan penyerapan Tenaga Kerja di Kota Batam demi pengurangan tingkat pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis**

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit daripada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan lebih jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa datang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik berdasarkan atas visi dan misi yang telah dijelaskan sebelumnya.

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam pada 5 (lima) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam, dan Sasaran Strategis Kementerian Tenaga Kerja yaitu :

1. Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel.
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan perumusan tujuan strategis diatas, maka dirumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Perumusan sasaran strategis yang mengacu pada tujuan strategis dapat dirinci sebagai berikut :

1. Mewujudkan tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel. Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, maka sasaran strategisnya adalah:
  - 1) Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
  - 2) Tersedianya lapangan kerja dan kesempatan kerja
  - 3) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja
  - 4) Meningkatkan kualitas lembaga pelatihan
  - 5) Meningkatkan ketenangan bekerja dan berusaha bagi pekerja dan pengusaha
  - 6) Meningkatkan perlindungan sosial tenaga kerja
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, maka sasaran strategisnya adalah:
  - Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah.

## **2.4 Program Kerja**

Program Kerja merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Program Kerja Dinas Tenaga Kerja meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota  
Program ini dimaksudkan untuk peningkatan penyediaan sarana administrasi perkantoran guna menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, kegiatan ini bersifat rutinitas kantor.
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja  
Program ini dimaksudkan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan terciptanya usaha mandiri.
3. Program Hubungan Industrial  
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelesaian perselisihan pengusaha pekerja, serta peningkatan jaminan sosial tenaga kerja.

## 2.5 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi.

Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

Indikator Kinerja Daerah berdasarkan indikator sasaran strategis RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan target capaian tahun 2021 adalah 10,50% (11%). Berdasarkan katadata.co.id yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) tanggal 5 November 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia pada Agustus 2021 yaitu sebesar 6,49%. Angka pengangguran tertinggi diatas rata-rata nasional yaitu Provinsi Kepulauan Riau sebesar 9,91%, TPT Kota Batam yaitu sebesar 11,64%.

Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Utama**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menurunnya masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	11%
		Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	95%
		Persentase Pencari Kerja yang bersertifikasi kompetensi	100%
		Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikasi kompetensi	100%

		Persentase Pencari Kerja yang terserap dan ditempatkan	72%
2	Meningkatnya kualitas lembaga pelatihan	Persentase Lembaga yang terakreditasi	20%
3	Meningkatkan penanganan masalah ketenagakerjaan dan menciptakan kewirausahaan baru dan usaha mandiri bagi korban pemutusan hubungan kerja	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan berbasis masyarakat	20%
4	Meningkatkan ketenangan bekerja dan berusaha bagi pelaku proses produksi pekerja	Persentase pekerja / buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	85%
5	Meningkatkan pembinaan dan penegakan hukum ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang melaksanakan peraturan ketenagakerjaan	30%
6	Mengusahakan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana dan prasarana	Persentase tersedianya pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	100%
		Persentase tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran	100%

## 2.6 Perencanaan Kinerja

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam untuk Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan program kegiatan dengan sumber dana dari APBD Kota Batam sebesar **Rp 22.859.308.283,-** (Dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) kemudian pada APBDP 2021 mengalami rasionalisasi dana menjadi **21.856.938.109,-** (Dua puluh satu milyar delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah), guna melaksanakan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tahun 2021 s/d 2026 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam tahun 2021 - 2026. Adapun sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang direncanakan dalam tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 2.2**  
**Perencanaan Kinerja**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menurunnya masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	11%	∴
		Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	95%	-
		Persentase Pencari Kerja yang bersertifikasi kompetensi	100%	<b>Program :</b> PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA  <b>Kegiatan :</b> 1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
		Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikasi kompetensi	100%	<b>Program :</b> PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA  <b>Kegiatan :</b> 1. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Persentase Pencari Kerja yang terserap dan ditempatkan	72%	∴
2	Meningkatnya kualitas lembaga pelatihan	Persentase Lembaga yang terakreditasi	20%	<b>Program :</b> PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA  <b>Kegiatan :</b> 1. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
3	Meningkatkan penanganan masalah ketenagakerjaan dan menciptakan kewirausahaan baru dan usaha mandiri bagi korban pemutusan	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan berbasis masyarakat	20%	∴

	hubungan kerja			
4	Meningkatkan ketenangan bekerja dan berusaha bagi pelaku proses produksi pekerja	Persentase pekerja / buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	85%	:-
5	Meningkatkan pembinaan dan penegakan hukum ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang melaksanakan peraturan ketenagakerjaan	30%	<p><b>Program :</b> PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</p> <p><b>Kegiatan :</b> 1. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</p>
6	Mengusahakan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana dan prasarana	Persentase tersedianya pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	<p><b>Program :</b> PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</p> <p><b>Kegiatan :</b> 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>
		Persentase tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran	100%	<p><b>Program :</b> PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</p> <p><b>Kegiatan :</b> 1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>

## **2.7 Penetapan Kinerja**

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Agar supaya pencapaian indikator kinerja berjalan dengan baik sebagaimana yang direncanakan perlu suatu komitmen bersama antara pimpinan OPD (Kepala Dinas) dengan Walikota Batam dalam suatu Penetapan Kinerja sebagaimana Tabel 2.3 sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Penetapan Kinerja APBD 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Menurunnya masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	11%	-	-
		Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	95%	-	-
		Persentase Pencari Kerja yang bersertifikasi kompetensi	100%	<b>Program :</b> PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA  <b>Kegiatan :</b> 1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Rp. 5.663.795.000,00.-
		Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikasi kompetensi	100%	<b>Program :</b> PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA  <b>Kegiatan :</b> 1. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 6.038.884.800,00.-

		Persentase Pencari Kerja yang terserap dan ditempatkan	72%	:	-
2	Meningkatnya kualitas lembaga pelatihan	Persentase Lembaga yang terakreditasi	20%	<b>Program :</b> PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA  <b>Kegiatan :</b> 1. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp. 809.500.000,00.-
3	Meningkatkan penanganan masalah ketenagakerjaan dan menciptakan kewirausahaan baru dan usaha mandiri bagi korban pemutusan hubungan kerja	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan berbasis masyarakat	20%	:	-
4	Meningkatkan ketenangan bekerja dan berusaha bagi pelaku proses produksi pekerja	Persentase pekerja / buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	85%	:	-
5	Meningkatkan pembinaan dan penegakan hukum ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang melaksanakan peraturan ketenagakerjaan	30%	<b>Program :</b> PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL  <b>Kegiatan :</b> 1. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 273.473.000,00.-

6	Mengusahakan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana dan prasarana	Persentase tersedianya pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	<b>Program :</b> PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  <b>Kegiatan :</b> 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  2. Administrasi Umum Perangkat Daerah  3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 8.220.460.123,00.-  Rp. 487.179.200,00.-  Rp. 859.746.560,00.-
		Persentase tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran	100%	<b>Program :</b> PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  <b>Kegiatan :</b> 1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 191.740.000,00.-  Rp. 314.529.600,00.-
<b>Jumlah</b>					<b>Rp. 22.859.308.283,00.-</b>

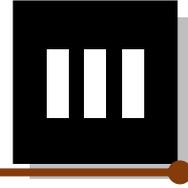
**Tabel 2.4**  
**Penetapan Kinerja APBDP 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Menurunnya masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	11%	∴	-
		Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	95%	∴	-
		Persentase Pencari Kerja yang bersertifikasi kompetensi	100%	<b>Program :</b> PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA  <b>Kegiatan :</b> 1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Rp. 5.663.795.000,00.-
		Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikasi kompetensi	100%	<b>Program :</b> PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA  <b>Kegiatan :</b> 1. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 6.038.884.800,00.-

		Persentase Pencari Kerja yang terserap dan ditempatkan	72%	:	-
2	Meningkatnya kualitas lembaga pelatihan	Persentase Lembaga yang terakreditasi	20%	<b>Program :</b> PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA  <b>Kegiatan :</b> 1. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp. 794.125.000,00.-
3	Meningkatkan penanganan masalah ketenagakerjaan dan menciptakan kewirausahaan baru dan usaha mandiri bagi korban pemutusan hubungan kerja	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan berbasis masyarakat	20%	:	-
4	Meningkatkan ketenangan bekerja dan berusaha bagi pelaku proses produksi pekerja	Persentase pekerja / buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	85%	:	-
5	Meningkatkan pembinaan dan penegakan hukum ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang melaksanakan peraturan ketenagakerjaan	30%	<b>Program :</b> PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL  <b>Kegiatan :</b> 1. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 222.865.000,00.-

6	Mengusahakan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana dan prasarana	Persentase tersedianya pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	<b>Program :</b> PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  <b>Kegiatan :</b> 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  2. Administrasi Umum Perangkat Daerah  3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 7.517.568.029,00.-  Rp. 336.308.200,00.-  Rp. 832.232.480,00.-
		Persentase tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran	100%	<b>Program :</b> PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  <b>Kegiatan :</b> 1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 146.740.000,00.-  Rp. 304.419.600,00.-
<b>Jumlah</b>					<b>Rp. 21.856.938.109,00.-</b>





## Bab III

# AKUNTABILITAS KINERJA

**A**kuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah upaya untuk meneguhkan komitmen pemerintah dalam proses penyelenggaraan negara yang baik (good governance) dan akuntabel. LKjIP Dinas Tenaga Kerja Kota Batam disusun sebagai komitmen dan upaya untuk selalu mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Dinas Tenaga Kerja sebagai organisasi pemerintah yang akuntabel. Implementasi SAKIP atau manajemen kinerja yang baik tidak terlepas dari fungsi pengendalian yang dilakukan melalui evaluasi kinerja dengan melakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui capaian hasil sehingga dapat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses pengukuran capaian hasil tentunya dibarengi dengan peninjauan terhadap proses yang dilakukan untuk mencapai hasil tersebut, yang nantinya berguna untuk melakukan berbagai perbaikan-perbaikan yang diperlukan guna penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja.

## **2.1 Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja**

Dinas Tenaga Kerja telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu kepada penetapan kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2020 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengukuran data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Adapun hasil pengukuran kinerja yang telah dicapai Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021 sebagaimana Tabel 3.1 berikut

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Indikator Kinerja Utama**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2019		2020		2021	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Menurunnya masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	6,2%	7,72%	6,2%	11,79%	11%	11,64%
		Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	90%	92,34%	94%	139,5%	95%	94,50%
		Persentase Pencari Kerja yang bersertifikasi kompetensi	-	-	-	-	100%	100%
		Persentase tingkat kesempatan kerja	5,35%	5,80%	50%	35%	-	-
		Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikasi kompetensi	81,44%	81,60%	82%	100%	100%	100%
		Persentase Pencari Kerja yang terserap dan ditempatkan	60,82%	76,70%	70%	71,10%	72%	59,04%
2	Meningkatnya kualitas lembaga pelatihan	Persentase Lembaga yang terakreditasi	16,49%	48,45%	20%	20%	20%	20,00%
3	Meningkatkan penanganan masalah ketenagakerjaan dan menciptakan kewirausahaan baru dan usaha mandiri bagi korban pemutusan hubungan kerja	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan berbasis masyarakat	43,75%	6,25%	20%	0%	20%	0%
4	Meningkatkan ketenangan bekerja dan berusaha bagi pelaku proses produksi pekerja	Persentase pekerja / buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	75%	73,09	76%	70%	85%	76,67%

<b>5</b>	Meningkatkan pembinaan dan penegakan hukum ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang melaksanakan peraturan ketenagakerjaan	36,11%	13,25%	23%	25%	30%	25%
<b>6</b>	Mengusahakan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana dan prasarana	Persentase tersedianya pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Dari tabel diatas menunjukkan pencapaian kinerja utama Dinas Tenaga Kerja tahun 2021 adalah naik sebesar 0.64 persen dari target yang ditetapkan. Keberhasilan pada sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yaitu persentase tingkat pengangguran terbuka. Indikator ini tidak didukung oleh kegiatan melainkan dengan melakukan koordinasi dengan manajemen perusahaan tentang lowongan kerja yang tersedia secara berkala. Banyaknya perusahaan yang tutup dan tidak membuka lowongan menjadi salah satu penyebab tingginya angka pengangguran terbuka di Kota Batam, disamping adanya wabah Covid-19 yang mempengaruhi seluruh lini kehidupan. Hal ini menjadi penyebab utama tidakberhasilnya penekanan jumlah pengangguran di Kota Batam.

Mengingat tujuan jangka menengah pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tahun 2021-2026 adalah meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Kota Batam dengan indikator kinerja tujuan yaitu **Tingkat Pengangguran Terbuka**, sasaran yang ingin dicapai dalam mendukung tujuan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam kurun waktu tersebut sebagai berikut:

- Menurunnya masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran dengan indikator kinerja sasaran (ultimate outcome) yaitu :
  - Persentase penurunan jumlah pengangguran
  - Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah tersebut, strategi dan arah kebijakan harus dirumuskan secara komprehensif, sinkron, konsisten dan selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut disajikan pada table Pengukuran Perencanaan Kinerja Sasaran:

**Tabel 3.2**  
**Pengukuran Perencanaan Kinerja**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI	%(REALISASI/TARGET)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Menurunnya masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	11%		11,64%	105,82	Tidak tercapainya target kinerja utama adalah sebesar 105.82% dari target yang ditetapkan disebabkan berbagai faktor diantaranya faktor wabah Covid-19, banyaknya perusahaan yang tutup dan tidak membuka lowongan.
		Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	95%		94,50%	99,47	Keberhasilan ini dikarenakan upaya preventif melalui pembinaan hubungan industrial kepada pihak perusahaan dan pekerja yang berselisih.
		Persentase Pencari Kerja yang bersertifikasi kompetensi	100%	<b>Program :</b> PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	100%	100	Keberhasilan ini akibat besarnya antusias pencari kerja dalam meraih kompetensi yang sesuai

				<b>Kegiatan :</b> 1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			dengan standar kompetensi yang dibutuhkan di pasar kerja.
	Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikasi kompetensi	100%		<b>Program :</b> PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA  <b>Kegiatan :</b> 1. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	100%	100	Keberhasilan ini karena besarnya antusias tenaga kerja dalam meningkatkan dan memaksimalkan produktivitasnya. untuk memenuhi standar kompetensi yang berdaya saing di dunia kerja.
	Persentase Pencari Kerja yang terserap dan ditempatkan	72%			59,04%	82,00	Termasuk kategori cukup tinggi dan diharapkan pelayanan publik melalui informasi pasar kerja bisa ditingkatkan lagi untuk kedepannya.
<b>2</b>	Meningkatnya kualitas lembaga pelatihan	Persentase Lembaga yang terakreditasi	20%	<b>Program :</b> PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA  <b>Kegiatan :</b> 1. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	20,00%	100	Target kinerja ini tercapai dengan kategori sangat baik dimana skema yang ditetapkan yaitu 35 Skema untuk 20 LPK, 18 Instruktur dan 18 Assesor yang dilakukan pembinaan tercapai 100%.



3	Meningkatkan penanganan masalah ketenagakerjaan dan menciptakan kewirausahaan baru dan usaha mandiri bagi korban pemutusan hubungan kerja	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan berbasis masyarakat	20%		0%	0	Capaian indikator kinerja ini tidak tercapai, hal ini karena Indikator kinerja ini tidak didukung kegiatan oleh karena refocusing dan realokasi anggaran murni tahun 2021, sehingga terjadinya perubahan struktur belanja pada APBD murni 2021.
4	Meningkatkan ketenangan bekerja dan berusaha bagi pelaku proses produksi pekerja	Persentase pekerja / buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	85%		76,67%	90,20	Termasuk kategori sangat baik dikarenakan upaya pembinaan kepada perusahaan dan pekerja secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.
5	Meningkatkan pembinaan dan penegakan hukum ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang melaksanakan peraturan ketenagakerjaan	30%	<b>Program .:</b> PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL  <b>Kegiatan .:</b> 1. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	25%	83,33	Termasuk kategori cukup tinggi. Keberhasilan ini dikarenakan upaya pembinaan antara perusahaan dan pekerja secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan.
6	Mengusahakan peningkatan	Persentase tersedianya pelayanan kebutuhan	100%	<b>Program .:</b> PROGRAM PENUNJANG	100%	100	Sebagai kegiatan untuk



	<p>pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana dan prasarana</p>	<p>administrasi perkantoran</p>	<p>URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</p> <p><b>Kegiatan.:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li> <li>2. Administrasi Umum Perangkat Daerah</li> <li>3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> </ol>			<p>memenuhi kebutuhan yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang pakai habis untuk kegiatan kantor, belanja perjalanan dinas, dan lain-lain. Capaian dari kegiatan ini sangat baik yaitu 100%.</p>
	<p>Persentase tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran</p>	<p>100%</p>	<p><b>Program.:</b></p> <p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</p> <p><b>Kegiatan.:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li> <li>2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> </ol>	<p>100%</p>	<p>100</p>	<p>Sebagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur. Pada kegiatan ini telah dilakukan pemeliharaan berupa belanja barang pakai habis, belanja jasa kantor, belanja pemeliharaan gedung, peralatan dan mesin lainnya. Capaian dari kegiatan ini sangat baik yaitu 100%.</p>



Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Capaian sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja tahun 2021 dijelaskan sebagai berikut:

**A. Sasaran : Menurunnya masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran**

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 5 (lima) indikator kinerja sasaran yaitu :

*a) Tingkat pengangguran terbuka*

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yaitu persentase tingkat pengangguran terbuka. Indikator ini tidak didukung oleh kegiatan melainkan dengan melakukan koordinasi dengan manajemen perusahaan tentang lowongan kerja yang tersedia secara berkala. Tidak tercapainya target kinerja utama Dinas Tenaga Kerja adalah sebesar 105.82% dari target yang ditetapkan disebabkan berbagai faktor diantaranya banyaknya perusahaan yang tutup dan tidak membuka lowongan. Faktor lain yang menjadi pemicu adalah terjadinya wabah penyakit covid-19 di Indonesia menyebabkan lumpuhnya perekonomian tidak hanya di Indonesia melainkan seluruh dunia. Keppres 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (covid-19) menyebutkan bahwa jumlah kasus kematian karena Corona Virus sudah meningkat dan meluas antar wilayah dan antar negara serta memiliki dampak pada kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

*b) Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan*

Capaian indikator kinerja meningkatnya persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan masuk kategori tinggi yaitu sebesar 99.47%. Keberhasilan ini dikarenakan upaya preventif melalui

pembinaan hubungan industrial kepada pihak perusahaan dan pekerja yang berselisih. Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui pengadilan hubungan industrial adalah belum semua pengusaha dan pekerja memahami mekanisme penyelesaian hubungan industrial.

c) *Persentase Pencari Kerja yang bersertifikasi kompetensi*

Capaian indikator kinerja sasaran ini masuk kategori sangat baik yaitu sebesar 100%. Keberhasilan ini akibat besarnya antusias pencari kerja dalam meraih kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan di pasar kerja. Untuk mencapai sasaran ini didukung oleh :

Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi. Target kinerja untuk kegiatan ini ditetapkan sebesar 711 orang jumlah pencari kerja yang dilatih dan realisasi capaian adalah sebesar 711 orang sehingga capaiannya adalah 100%.

d) *Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikasi kompetensi*

Capaian indikator kinerja sasaran ini masuk kategori sangat baik yaitu sebesar 100%. Keberhasilan ini karena besarnya antusias tenaga kerja dalam meningkatkan kompetensi untuk memenuhi standar kompetensi yang berdaya saing dalam memaksimalkan produktivitasnya. Untuk mencapai sasaran ini didukung oleh:

Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Target kinerja untuk kegiatan ini ditetapkan sebesar 630 orang jumlah pencari kerja yang dilatih dan realisasi capaian adalah sebesar 630 orang sehingga capaiannya adalah 100%.

e) *Persentase Pencari Kerja yang terserap dan ditempatkan*

Capaian indikator persentase pencari kerja yang terserap dan ditempatkan pada tahun 2021 ini masuk tinggi yaitu 82%, dan diharapkan peningkatan pelayanan publik melalui informasi kerja untuk memperluas penempatan tenaga kerja dapat terus dipertahankan.

**B. Sasaran : Meningkatnya kualitas lembaga pelatihan**

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yaitu Persentase lembaga kerja yang terakreditasi. Capaian indikator kinerja sasaran ini masuk kategori sangat baik yaitu sebesar 100%. Kegiatan pendukung indikator ini yaitu:

- Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- Target kinerja untuk Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta ditetapkan sebesar 35 Skema untuk 20 LPK, 18 Instruktur dan 18 Assesor yang dilakukan pembinaan dan realisasi capaian adalah sebesar 35 Skema untuk 20 LPK, 18 Instruktur dan 18 Assesor sehingga capaiannya adalah 100%.

**C. Sasaran : Meningkatkan penanganan masalah ketenagakerjaan dan menciptakan kewirausahaan baru dan usaha mandiri bagi korban pemutusan hubungan kerja**

Capaian indikator kinerja sasaran persentase wirausaha baru pada tahun 2021 ini tidak tercapai, hal ini karena Indikator kinerja ini tidak di dukung kegiatan oleh karena refocusing dan realokasi anggaran murni tahun 2021, sehingga terjadinya perubahan struktur belanja pada APBD murni 2021. selain itu untuk mewujudkan indikator ini adalah belum adanya pendampingan terhadap wirausaha baru yang telah dibentuk supaya dapat berkembang dan berfungsi sebagai penyedia/membuka lapangan pekerjaan.

**D. Sasaran : Meningkatkan ketenangan bekerja dan berusaha bagi pelaku proses produksi pekerja**

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yaitu Persentase pekerja / buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan.

Capaian indikator kinerja sasaran ini masuk kategori sangat baik yaitu sebesar 90.20%, hal ini dikarenakan upaya pembinaan kepada perusahaan dan pekerja secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

**E. Sasaran : Meningkatkan pembinaan dan penegakan hukum ketenagakerjaan**

Kegiatan pendukung indikator meningkatkan pembinaan dan penegakan hukum ketenagakerjaan yaitu :

Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota. Target kinerja untuk rapat operasional kegiatan LKS Tripartit dan Bimtek LKS Bipartit Kota Batam adalah 10 kali dalam setahun dan realisasi 10 kali pelaksanaan rapat operasional kegiatan, sehingga capaiannya adalah 100%.

Capaian indikator kinerja sasaran persentase perusahaan yang melaksanakan peraturan ketenagakerjaan ini masuk kategori sedang yaitu sebesar 83.33%. Keberhasilan ini dikarenakan upaya pembinaan antara perusahaan dan pekerja secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan.

**F. Sasaran : Mengusahakan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana dan prasarana**

*a) Persentase tersedianya pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran*

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yaitu tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang

tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Kegiatan pendukung indikator ini yaitu :

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sebagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang pakai habis untuk kegiatan kantor, belanja perjalanan dinas, dan lain-lain. Capaian dari kegiatan ini sangat baik yaitu 100%.

*b) Persentase tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran*

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yaitu tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran. Kegiatan pendukung indikator ini yaitu :

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Sebagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur. Pada kegiatan ini telah dilakukan belanja modal alat kantor dan rumah tangga.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Sebagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur. Pada kegiatan ini telah dilakukan pemeliharaan berupa belanja barang pakai habis, belanja jasa kantor, belanja pemeliharaan gedung, peralatan dan mesin lainnya.

Capaian dari kegiatan ini sangat baik yaitu 100%.

## **3.2 Realisasi Anggaran**

Pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tahun anggaran 2021 sebagai upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam sebesar Rp. 22.859.308.283,00.- baik yang dialokasikan dalam anggaran belanja operasi maupun belanja modal.

Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, terdapat Pemuktahiran pada Program dan Kegiatan, termasuk pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, dimana program disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan, kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah, dan Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Secara umum serapan anggaran Dinas Tenaga Kerja Tahun 2020 sudah cukup baik, dimana dari total 7 kegiatan terdapat 5 kegiatan yang pencapaiannya sangat baik yaitu diatas 94%, sementara 2 kegiatan pada Program Peningkatan Hubungan Industrial yang Harmonis dibawah angka 72%, yang tidak terserap maksimal karena adanya refocusing dan realokasi anggaran tahun 2020. Meskipun pada tahun 2020 Program Peningkatan Hubungan Industrial yang Harmonis dibawah angka 72% pada penyerapan anggarannya, namun pada tahun 2021 pencapaian kegiatan pada program ini mengalami peningkatan menjadi 90,47% dan angka penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial juga tinggi. Hal ini patut di apresiasi dipandang dari banyaknya kasus yang tidak sebanding dengan jumlah mediator yang ada saat ini yaitu 7 orang mediator.

Mengingat tantangan dimasa yang akan datang semakin berat, dibutuhkan tambahan mediator secara kuantitas serta peningkatan kualitasnya, untuk jangka pendek setidaknya dibutuhkan 15 orang mediator guna menangani perselisihan hubungan industrial dan melakukan pembinaan, sehingga perselisihan hubungan industrial dapat dikurangi.

Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) untuk Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2020 yang telah dikelola seluruhnya sebesar:

- Rp. 10.359.519.085.00,- (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah), sedangkan realisasi sebesar :
  
- Rp. 10.082.689.465,00 (Sepuluh Miliar Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) 97.33%.

Pada Tahun Anggaran 2021 ini Pemerintah Kota Batam kembali lagi mengalami defisit anggaran sehingga berpengaruh pada capaian serapan anggaran terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Namun pencapaian secara umum sudah sangat baik, dimana sebagian besar subkegiatan tercapai diatas 90% sebagaimana table 3.3 berikut ini.

**Tabel 3.3**  
**Serapan Anggaran Tahun 2021**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU		REALISASI KEUANGAN	%
		MURNI	PERUBAHAN		
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>10,073,655,483.00</b>	<b>9,137,268,309.00</b>	<b>8,698,069,443.00</b>	<b>95.19%</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8,220,460,123.00</b>	<b>7,517,568,029.00</b>	<b>7,161,460,935.00</b>	<b>95.26%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,156,500,123.00	7,453,608,029.00	7,097,500,935.00	95.22%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	63,960,000.00	63,960,000.00	63,960,000.00	100 %
<b>2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>487,179,200.00</b>	<b>336,308,200.00</b>	<b>326,728,050.00</b>	<b>97.15%</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,650,000.00	5,650,000.00	5,565,000.00	98.50%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	126,634,500.00	126,634,500.00	125,001,850.00	98.71%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60,060,000.00	45,045,000.00	44,990,000.00	99.88%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	147,468,700.00	147,468,700.00	141,900,000.00	96.22%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	3,600,000.00	3,600,000.00	2,750,000.00	76.39%
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	143,766,000.00	7,910,000.00	6,521,200.00	82.44%
<b>3</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>191,740,000.00</b>	<b>146,740,000.00</b>	<b>139,650,000.00</b>	<b>95.17%</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	191,740,000.00	146,740,000.00	139,650,000.00	95.17%
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>859,746,560.00</b>	<b>832,232,480.00</b>	<b>797,238,658.00</b>	<b>95.80%</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	310,461,600.00	282,947,520.00	253,492,126.00	89.59%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	549,284,960.00	549,284,960.00	543,746,532.00	98.99%
<b>5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>314,529,600.00</b>	<b>304,419,600.00</b>	<b>272,991,800.00</b>	<b>89.68%</b>

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	190,397,600.00	180,287,600.00	153,100,300.00	84.92%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24,260,000.00	24,260,000.00	24,060,000.00	99.18%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99,872,000.00	99,872,000.00	95,831,500.00	95.95%
<b>II</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>12,512,179,800.00</b>	<b>12,496,804,800.00</b>	<b>12,217,268,570.00</b>	<b>97.76%</b>
<b>6</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>5,663,795,000.00</b>	<b>5,663,795,000.00</b>	<b>5,529,890,570.00</b>	<b>97.64%</b>
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	5,663,795,000.00	5,663,795,000.00	5,529,890,570.00	97.64%
<b>7</b>	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>809,500,000.00</b>	<b>794,125,000.00</b>	<b>786,785,000.00</b>	<b>99.08%</b>
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	809,500,000.00	794,125,000.00	786,785,000.00	99.08%
<b>8</b>	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6,038,884,800.00</b>	<b>6,038,884,800.00</b>	<b>5,900,593,000.00</b>	<b>97.71%</b>
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	6,038,884,800.00	6,038,884,800.00	5,900,593,000.00	97.71%
<b>III</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>273,473,000.00</b>	<b>222,865,000.00</b>	<b>201,625,000.00</b>	<b>90.47%</b>
<b>9</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>273,473,000.00</b>	<b>222,865,000.00</b>	<b>201,625,000.00</b>	<b>90.47%</b>
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	273,473,000.00	222,865,000.00	201,625,000.00	90.47%
	<b>Jumlah</b>	<b>22,859,308,283.00</b>	<b>21,856,938,109.00</b>	<b>21,116,963,013.00</b>	<b>96.61%</b>

## Bab IV

# PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tahun 2021 – 2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan pada tahun 2021. Berdasarkan pengukuran kinerja 6 sasaran strategis dengan menggunakan 11 indikator sasaran.

Hasil laporan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 6 sasaran, terdapat 11 indikator yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2021, 9 (sembilan) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 82% dari total indikator. Sementara itu sebanyak 2 (dua) indikator atau sebesar 18% belum memenuhi target. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala antara lain:
  - Refocusing dan realokasi anggaran murni tahun 2021, sehingga terjadinya perubahan struktur belanja pada APBD murni 2021.
  - Terjadinya penutupan beberapa perusahaan di Kota Batam sepanjang tahun 2021.

Capaian yang tertinggi pada indikator Persentase Pencari Kerja yang bersertifikasi kompetensi dan Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikasi kompetensi yang diselesaikan dengan presentase 100%, sementara indikator

yang mengalami capaian yang rendah adalah indikator Persentase Pencari Kerja yang terserap dan ditempatkan yaitu sebesar 59.04%.

2. Sasaran yang tidak tercapai adalah menurunkan tingkat pengangguran terbuka realisasi capaian naik sebesar 11.64%. Hal ini disebabkan iklim industri di Kota Batam tahun 2021 kurang kondusif dimana banyak perusahaan yang tutup. Dan juga indikator Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan berbasis masyarakat yang memang sejak awal tidak dianggarkan lagi akibat keterbatasan anggaran APBD.

## **4.2 Rekomendasi**

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam di tahun mendatang harus ditempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala atau hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai indikator kinerja. Upaya strategis pemecahan masalah tersebut adalah:

- 1) Perlu dukungan personil yang bertanggung jawab untuk memperoleh data kinerja agar program dan kegiatan yang dibuat benar-benar mencapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan Visi dan Misi yang sudah dituangkan di dalam Renstra.
- 2) Meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan secara terpadu sehingga dapat menghasilkan pekerjaan lebih optimal, tepat sasaran dan tepat waktu.
- 3) Menyiapkan kekuatan sumber daya manusia dalam melaksanakan program dan kegiatan agar kegiatan tersebut menghasilkan kualitas yang baik dan maksimal.
- 4) Melakukan evaluasi secara rutin terhadap kegiatan yang sedang dilakukan sehingga keberhasilan capaian indikator kinerja di tahun-tahun berikutnya dapat ditingkatkan sebagai upaya merealisasikan Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dapat terwujud.